

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pasawahan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal, yaitu :

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah tahun 2022. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

3. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta di Kecamatan Pasawahan dalam rangka mencapai masyarakat Pasawahan yang Hebat (Hidup , Elok, Bersih, Asri dan tertib. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana-rencana resmi daerah di atasnya seperti

RKPD, Renstra dan RPJMD. Renja menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada Tahun yang direncanakan. Renja Perubahan Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasawahan serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 memperhatikan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bupati Purwakarta, sesuai yang tertuang didalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana Tema Pembangunan Daerah untuk Tahun 2022 yaitu “MEMANTAPKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN”.

Dengan Program Prioritas Pembangunan untuk tahun 2022 yakni :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan;
2. Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat;
3. Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK;
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perekonomian Masyarakat;

Sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2022 diprioritaskan pada :

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

- 2) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup, dan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban;
- 3) Peningkatan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin;
- 4) Penguatan UMKM dan Peningkatan Produksi Pangan;
- 5) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi Daerah yang Berbasis IPTEK;
- 6) Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance; dan
- 7) Peningkatan Infrastruktur Bagi Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematis sebagaimana Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Verifikasi yang dilakukan harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi pelaksanaan Renja Perubahan (dasar hukum) yakni sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

- Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 23. Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 25. Peraturan Bupati Purwakarta nomor : 169 Tahun 2021 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 adalah untuk :

- 1) Menyelaraskan rencana strategis Kabupaten Purwakarta dengan Pelayanan Kecamatan Pasawahan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Kecamatan Pasawahan;
- 2) Menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan kedalam Rencana Kinerja Tahunan;
- 3) Sebagai guide line bagi Kecamatan Pasawahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun 2021;

1.2.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 adalah :

- 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan Pasawahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
- 2) Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasawahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2022;
- 3) Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Kecamatan Pasawahan;
- 4) Menjadi pedoman Kecamatan Pasawahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;

- 5) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.

1.2 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. BAB IV PENUTUP

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

AB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

- I. *Perubahan Renja Parsial 1 Kecamatan Pasawahan Tahun 2022 terdapat pada Program ke Satu : yaitu : PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA : Anggaran Murni Rp. 220.292.448 menjadi Rp. 243.388.852,-*
 1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula tidak dianggarkan belanja Tunjangan Penghasilan Pegawai ke 13 dan 14 yang pembayarannya 50 % sesuai Peraturan Presiden Nomor : 16 tahun 2022 Tanggal 13 April 2022, tentang : Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Sehingga Anggaran Kas Belanja dari Bulan Desember 2022 dialihkan ke bulan bulan April tahun 2022;
 2. (Parsial 3) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Belanja Tagihan Listrik) anggaran Murni : Rp. 41.072.680,- setelah perubahan menjadi Rp. 55.072.680 (bertambah R9.14.000.000,-);
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN), Anggaran Murni Rp. 220.292.448,- setelah perubahan menjadi Rp.229.388.852 (bertambah Rp. 9.096.404).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan Tahun anggaran 2022, ada 4 Program, 8 Kegiatan dan 26 sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun 2022 antara lain :

**2.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA, meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

**3. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah; (74,90 %)**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 100 %
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; : 0 %
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 100 %
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 99,97 %

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (61,20 %)

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 61,26 %
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 100 %
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 68,36 %
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; 0%

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (62,35 %)

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 100 %
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; -%
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 100 %
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 66,98 %
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 92,29 %
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 %

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 0%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 74,80 %
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 43,54 %
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: 76,37 %

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 34,29 %
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 100 %

Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar : 63,33 %

2.1.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar **100 %**

2.1.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar : 64 %

Tingkat capaian Renja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III dapat disajikan dalam **tabel** berikut :

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.593.600	4.593.600	100	100,00	Mulai januari sampai Desember	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.357.501	0	0,00	0,00	Mulai Januari sampe Desember	Jumlah biaya perjalanan Dinas yang disediakan	42 OH	0 OH
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.124.800	6.124.800	100	100,00	Mulai januari sampe desember	Jumlah Dokumen laporan	1 Dokumen	1 Dokumen

-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.359.200	5.357.501	99,97	100,00	Mulai Januari sampe Desember	Jumlah Dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.478.240.069	974.985.458	39,34	39,34	Mulai Januari sampe Desember	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	7 bulan
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.050.000	4.050.000	100	100,00	Mulai Januari sampe Desember	Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan	3 OH	3 OH
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.276.500	4.974.500	68,36	100,00	Mulai Januari sampai Desember	jumlah Dokumen laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.920.000	0	0,00	0,00	Mulai januari sampai Desember	Jumlah biaya perjalanan Dinas yang disediakan	32 OH	0 OH
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.731.000	6.731.000	100	100,00	Mulai Januari sampai Desember	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	4 item	4 item
---	--	-----------	-----------	-----	--------	-------------------------------	---	--------	--------

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.917.500	0	0,00	0,00	Mulai januari sampai Desember	Jumlah Pengadaan BMD yang disediakan	4 item	0 item
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.232.550	5.232.550	100	100,00	Mulai Januari sampai Desember	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15 item	15 item
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.116.850	127.026.850	47,03	47,03	Mulai januari sampai Desember	Jumlah ATK yang disediakan dan Jumlah Makan dan minum yang disediakan	25 item dan dus	47 item dan dus
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.675.000	4.099.800	35,12	35,12	Mulai januari sampai Desember	Jumlah cetak dan penggandaan	7 item	5 item

-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0,00	0,00				
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0,00	0,00				
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.072.680	23.510.322	57,24	57,24	Mulai januari sampai Desember	Jumlah penyediaan komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	6 bulan
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.890.400	3.000.000	43,54	45,00	mulai januari sampai Desember	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	2 item	1 item
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.292.448	117.107.349	53,16	53,16	Mulai januari sampai Desember	Jumlah Penyediaan Pegawai Non ASN	9 Orang	6 Orang

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.800.000	10.000.000	25,77	29,41	Mulai januari sampai Desember	Jumlah pembayaran pajak dan kendaraan dinas yang disediakan, jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas yang disediakan	9 unit	2 unit

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.420.000	4.420.000	100	100,00	Mulai januari sampai Desember	Jumlah komputer	4 unit	4 unit
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.947.850	7.947.850	100	100,00	Mulai januari sampai Desember	Prestasi penyampaian informasi hasil pembangunan pada masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								

-	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0	0,00	0,00				
8	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.320.000	0	0,00	0,00	Mulai januari sampai Desember	Persentase pembinaan administrasi Desa	1 Kegiatan	0 Kegiatan
-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.167.000	0	0,00	0,00	Mulai januari sampai Desember	Persentase pembinaan kepala Desa dan Aparatur Desa	1 Kegiatan	0 Kegiatan
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		0	0,00	0,00				
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	0,00	0,00				
-	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		0	0,00	0,00				

-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13.320.000	0	0,00	0,00	Mulai januari sampai Desember	Persentase Pengawasan dan Koordinasi kewilayahan	1 Kegiatan	0 Kegiatan
TOTAL		3.199.824.948	1.309.161.580	40,91	54,83				

Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d Triwulan II Tahun 2022, dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja masih rendah dikarenakan adanya pandemi covid 19, dan kesalahan dalam penentuan target kinerja. Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam triwulan berikutnya yaitu perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada triwulan berikutnya, sementara itu tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam RKPD berikutnya yaitu perlu dilakukan penyesuaian RKPD dengan APBD Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dijelaskan bahwa Kecamatan Pasawahan mempunyai tugas untuk:

- 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan;
- 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:
 - 1) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
 - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tk. kecamatan;
 - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
 - 4) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
 - 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Kecamatan Pasawahan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta melalui serangkaian program dan kegiatan,

baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasawahan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasawahan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

Nomor/Kode/aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(6+7+8+9+10)
7.01.0.00.00.11.00										
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	92	94	93		330
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	%	77,41	73,50	100,00	100,00	100	100		400,00
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00
4	Persentase Penyelenggaraan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00

Dari Tabel tersebut diatas, untuk indikator Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dapat tercapai sesuai target, dari target yang diharapkan 100% terealisasi 100%. Untuk Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor dapat tercapai 100%. Begitu pula dengan Persentase ketersediaan data kinerja OPD tingkat capaian 100%. Dan Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 100 %, Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan-undangan tercapai 100% begitu pula dengan Persentase ketersediaan data kinerja OPD tercapai dengan tingkat capaian 100%. Selanjutnya dengan **Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan** tingkat capainya tercapai 100 % Diharapkan pada tahun berjalan, tahun 2022 untuk target kinerja pelayanan kecamatan bisa sesuai target.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, Rencana Kerja dan Pendanaan terhadap program prioritas yang menjadi kewenangan sesuai dengan urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan dijabarkan dalam rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub

kegiatan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pasawahan tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 berikut ini.

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PASAWAHAN TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

Unit Organisasi : 7.01.01.2.01 Kecamatan Pasawahan
Sub Unit Organisasi : 7.01.01.2.01 Kecamatan Pasawahan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program Kegiatan	Periode Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2022 (Rp.)	Prakiraan Maju 2023 (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7					Unsur Kewilayahan									
7					Kecamatan						Rp.3.222.921.352,-			
7					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Rp3.178.166.502,-	3.384.067.419		
7					Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.435.101	23.578.611		
7	01 01 2.01 01			Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		100%	Jumlah Dokumen perangkat Daerah	2 Dokumen		4.593.600	918.720	
7	1 1 2.01 02			Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		100%	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		5.357.501	1.071.500	

7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen			6.124.800	1.224.960
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Dokumen			5.359.200	1.071.840
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.495.486.569	2.745.035226	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	14 Bulan			2.478.240.069	2.726.064.076
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen			4.050.000	4.455.000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen			7.276.500	8.004.150

7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	3 Dokumen			5.920.000	6.512.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									326.672.900	359.340.190		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 item			6.731.000	7.404.100	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				32.917.500	36.209.250	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan				5.232.550	5.755.805	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah penyediaan logistik kantor				270.116.850	297.128.535	

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan				11.675.000	12.842.500		
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												291.351.932	323.293.748	
7	01	01	2.04	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				55.072.680	57.826;314		
7	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				6.890.400	7.579.440		
7	01	01	2.08	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				229.388.852	264.707.994		
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												43.220.000	47.542.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				38.800.000	42.680.000		

7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				4.420.000	4.862.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								7.947.850	8.742.635			
7	01	03	2,01		koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa								7.947.850	8.742.635			
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				7.947.850	8.742.635	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								36.807.000	40.487.700			
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								36.807.000	40.487.700			
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				10.320.000	11.352.000	
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				13.167.000	14.483.700	

7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Pasawahan, Sawahkulon	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				13.320.000	14.652.000	
Jumlah Total														3.222.921.352,-	3.384.067.419		

BAB V

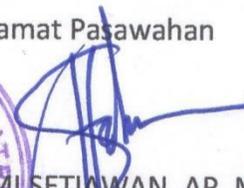
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan tahun 2022 yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Pasawahan tahun 2018 – 2023. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, bekerja efisien dan efektif.

Perubahan Renja Kecamatan Pasawahan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pasawahan. Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik (feed back) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan tahun 2022 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Pasawahan serta memberikan manfaat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

Pasawahan, 15 November 2022

Camat Pasawahan

H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
NIP. 19740909 199412 1 001



